

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isue kontemporer yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini adalah isue tentang korupsi. Isue ini merupakan isue sentral yang menyebabkan terpuruknya suatu tatanan pemerintahan yang bersifat global, baik dari segi ekonomi, politik (demokrasi) dan kesejahteraan umum negara. Adapun bentuk-bentuk korupsi yaitu Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.

Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas

atau jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan *Transparency Internasional* sejak 1998-2004 selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Tahun 1998 (peringkat 6 terkorup dari 85 negara), tahun 1999 (peringkat 3 terkorup dari 98 negara), tahun 2000 (peringkat 5 terkorup dari 90 negara), tahun 2001 (peringkat 4 terkorup dari 91 negara), tahun 2002 (peringkat 6 terkorup dari 102 negara), tahun 2003 (peringkat 6 terkorup dari 133 negara). Dan terakhir di tahun 2004, *Transparency Internasional* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke -5 dari 146 negara.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary*).

Adapun kondisi yang mendukung munculnya korupsi yaitu<sup>1</sup>:

- Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

Dalam proses pengambilan kebijakan, konsentrasi kekuasaan pemerintah tidak terfokus pada kepentingan rakyat tapi lebih cenderung pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan pribadi. Disamping itu, kekuasaan pemerintah dalam mengambil keputusan justru lebih sering menguntungkan orang-orang yang ada disekitarnya. Contohnya penyelewengan dana rutin dewan yang dilakukan oleh 4 anggota dewan dan 8 mantan anggota dewan Depok dengan jumlah nominasi korupsinya sebesar Rp 9,5 milyar yang kesemuanya itu menjadi tersangka. Sumber kompas 15 September 2004.

- Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.

Dalam hal ini, segala macam kebijakan yang akan diambil selalu tidak mengakomodir kepentingan, keinginan dan kebutuhan dari rakyat. Disamping itu, adanya pola-pola pengambilan keputusan yang hanya mengikut sertakan orang-orang yang mempunyai jasa atau andil dalam proses pengangkatan diri mereka sebagai pejabat. Contohnya penyelewengan anggaran daerah yang dilakukan oleh bupati Berau

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984 hal 18.

Kalimantan Timur dengan jumlah nominal korupsi Rp 88 milyar.

Bupati ini menjadi tersangka. Sumber kompas 04 Desember 2004.

- Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

Kampanye-kampanye politik yang dilakukan oleh para aktor politik dan pemerintah sangatlah mahal, hal ini yang menyebabkan tidak ada pilihan lain untuk mengembalikan modal mereka yang dipakai untuk kampanye politik dengan cara korupsi. Contohnya dugaan korupsi dana pemilu 2004 yang dilakukan oleh 67 pejabat di Temanggung dengan jumlah nominal korupsi Rp 12,6 milyar. Semua pejabat ini masih dalam proses penyelidikan. Sumber kompas 10 Januari 2005.

- Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

Pembangunan proyek-proyek yang tidak dibutuhkan oleh rakyat ternyata menjadi prioritas pemerintah dalam urusan pembangunan. Dalam hal ini, alokasi dana anggaran yang seharusnya untuk rakyat digunakan untuk pembangunan. Contohnya *Mark up* pengadaan proyek helikopter gubernur non aktif Nangro Aceh Darussalam dengan jumlah nominal korupsi sebesar Rp 9,5 milyar. Gubernur non aktif ini menjadi tersangka. Sumber kompas 19 Januari 2005.

- Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama.

Kecendrungan yang ditimbulkan oleh keadaan yang tertutup yaitu tidak adanya suatu *team* yang akan mengontrol segala macam aktifitas yang akan dilakukan sehingga yang hanya bermain dalam suatu lingkungan itu hanya dia dan temen-temen terdekatnya saja. Contohnya suap dana DAU mantan sekwilda Sumenep dengan jumlah nominal Rp 5 milyar yang menjadi tersangka. Sumber Surabaya post 17 Januari 2005.

- Lemahnya ketertiban hukum.

Hukum di Indonesia hanyalah sebagai pelengkap dari Negara kesatuan karena kurangnya kesadaran terhadap makna dan falsafah hukum itu sendiri. Hukum hanya diidentikkan hanya sebatas wacana dan tulisan.

- Lemahnya profesi hukum.

Dalam hal pelaksanaannya, aparat penegak hukum tidak bisa bertindak tegas terhadap para pelanggar hukum. Kecendrungan yang terjadi bahwasanya para penegak hukum atau profesi hukum lebih cenderung menerima suap dari pada melakukan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Contohnya terbebasnya mantan presiden Soeharto dari hukuman tindak pidana korupsi dengan alasan kesehatan dan untuk menghormati jasa-jasanya.

- Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.  
Adanya tekanan yang kuat dari pihak pemerintah terhadap kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa yang mengakibatkan membungkamnya media massa dari pantauan tindak kecurangan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan. Hal inilah yang membuat kejahatan ataupun kecurangan pemerintah tidak bisa diketahui oleh rakyat.
- Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.  
Disatu sisi, gaji pegawai pemerintah yang masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat hal inilah yang menyebabkan pintu korupsi terbuka lebar.
- Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.  
Dalam pelaksanaan pemilihan umum, rakyat tidak pernah mencari informasi tentang calon yang menjadi kandidat pada pemilihan umum tapi rakyat lebih cenderung mencari pendapatan dengan cara mencari siapa yang memberi suap yang lebih besar maka itulah yang akan dia pilih.
- Ketidadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau sumbangan kampanye.  
Dalam kasus penyuapan dalam kampanye, pemerintah tidak bisa menghentikannya, karena instansi yang menjadi pengawas tidak

bekerja secara ekstra malahan yang terjadi penyuaipan dalam kampanye semakin marak.

- Modernisasi yang mengabaikan korupsi.

Dalam arus modernisasi, ternyata korupsi masih terjadi. Tindakan korupsi ini terjadi karena dalam era modernisasi inilah kesempatan untuk mengisi kantong sendiri setelah sekian lama menjadi Negara yang miskin. Bisa juga modernisasi menyebabkan korupsi pada pemerintah yaitu adanya penukaran kekayaan ekonomi dengan suatu tindakan politik.

Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.

Latar belakang kebudayaan Indonesia merupakan sumber meluasnya korupsi. hal ini terbukti semakin banyaknya orang yang melakukan tindakan korupsi. Disamping adanya dongeng rakyat tentang korupsi, yakni apabila keadaan telah menunjukkan korupsi, korupsi dianggap sebagai hal yang sudah biasa dan menimbulkan suatu pemikiran terhadap rakyat bagaimana cara mereka mengikuti para terdahulu mereka untuk melakukan tindakan korupsi.

- Erosi Mental

Berkenaan dengan variable ini, maka jelas bahwa perbuatan korupsi disebabkan oleh rusaknya mentalitas seseorang. Dan sebagian besar masyarakat menilai bahwa rusaknya mental seseorang terutama aparat

pemerintah dan juga kalangan elit politik dan swasta, merupakan penyebab yang sangat sulit dan berbahaya dalam proses pembangunan politik bangsa. Karena jika ada kesempatan, maka kesempatan tersebut akan dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan korup dan memperkaya diri sendiri dan juga kemungkinan keluarganya sehingga akan terbentuk klan keluarga yang kuat dari segi ekonomi dan juga dari segi politik.

Dampak negatif yang di timbulkan oleh korupsi yaitu dalam berbagai bidang yaitu<sup>2</sup>:

#### 1. Demokrasi atau Politik

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi

---

<sup>2</sup> Junaidi Soewartono, *Korupsi, pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasan dalam penanggulangannya*. Jakarta, Restu Agung. 1995. hal 20.

mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Apabila di investigasikan, banyak sekali faktor-faktor yang dapat disebut sebagai penyebab timbulnya, lahirnya, tumbuhnya, serta berkembangnya korupsi khususnya dinegara-negara yang sedangberkembang. Diantara sekian banyak faktor ini, James C. Scott mengemukakan beberapa hal yang secara khusus memiliki hubungan dengan aspek politik dan pemerintahan<sup>3</sup>, yakni:

- a. Sistem politik resmi belum sepenuhnya diterima dan masih lemah landas hukumnya dibandingkan dengan ikatan keluarga dan suku yang masih kokoh.
- b. Pemerintah penting sebagai sumber pekerjaan dan mobilitas social.
- c. Ada golongan-golongan elit yang kaya raya yang tidak diberikan kesempatan mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah secara langsung dan terbuka.
- d. Tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup berlandas hukum yang berlaku umum di pihak golongan-golongan elit maupun di pihak rakyat banyak.

---

<sup>3</sup> James C. Scott, *Korupsi, politik gaya mesin, dan perubahan politik*, dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (eds.), *Bunga Rampai Karangan-Karangan Etika Pegawai Negeri*, Jakarta, Bhrata Karya Aksar, 1997. hal.141

## 2. Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan lapangan perniagaan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan

pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

### 3. Kesejahteraan umum negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus pro bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Cara-cara yang digunakan untuk mengukur korupsi dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini), Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi), dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok.

Korupsi merupakan musuh dari gerakan sosial karena pengaruh yang di timbulkan oleh korupsi ini sangat fatal. Dimana rakyat yang akan menjadi tumbal dari kekejian korupsi. Maka respon yang dikemukakan oleh semua gerakan, termasuk gerakan muslim sendiri, bahwasanya tindakan korupsi harus segera diberantas karena korupsi dinilai sangat membahayakan. Hanya dengan melihatnya sebagai persoalan sosial-budaya, politik dan hukum, maka kita boleh merancang suatu ikhtiar bersama mulai dari penumbuhan pemahaman kesadaran tentang hakikat korupsi, sebab-musababnya, sampai dengan aksi sosial, politik dan hukum untuk mengatasinya. Harus ada kesadaran etik yang merata di kalangan masyarakat dan sekaligus politik yang kuat di kalangan para pengambil keputusan untuk menyatakan perang melawan penyakit yang secara pasti akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini. Sebagai isue moral, para ulama atau kyai selaku pemimpin agama untuk kelompok mayoritas (Islam) memikul tanggung jawab paling utama melebihi pemimpin agama lain. Dalam konteks inilah gerakan pemberantasan korupsi dari kalangan para ulama atau kyai dilakukan.

Disamping itu, gerakan muslim menilai korupsi merupakan awal dari kehancuran negara dan agama, maka seharusnya tindakan korupsi itu harus cepat di berantas. Ada beberapa asumsi yang dibangun oleh gerakan muslim sehingga mau memberantas korupsi yaitu: Asumsi awal yang diambil adalah bahwa keterlibatan dan perubahan kelembagaan dan orientasi kelompok

masyarakat pesantren (agamawan) untuk pemberantasan korupsi akan strategis jika dimulai dengan memberikan tempat sendiri bagi reinterpretasi ajaran Islam sebagai upaya penting untuk mentransformasikan pemahaman keagamaan kaum agamawan sebagai subyek atau aktor gerakan itu sendiri. Di sini terutama adalah upaya teologis membasiskan ajaran amar ma'ruf nahi munkar, dan ajaran zakat sebagai acuan moral politik perpajakan dan penganggaran yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan umum dan pemihakan pada rakyat lemah. Asumsi kedua, bahwa keterlibatan dan perubahan kelembagaan dan orientasi kelompok masyarakat pesantren (agamawan) untuk pemberantasan korupsi akan strategis jika menggunakan media yang dekat dan dikenal oleh kelompok ini.

Gerakan mahasiswa muncul karena adanya ketidakadilan depolitisasi yang dilakukan penguasa. Terlebih lagi, ketika maraknya praktek-praktek ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki tengah terancam. Segala ragam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih merupakan dalam kerangka melakukan koreksi atau kontrol atas perilaku-perilaku politik penguasa yang dirasakan telah mengalami distorsi dan jauh dari komitmen awalnya dalam melakukan serangkaian perbaikan bagi kesejahteraan hidup rakyatnya. Oleh sebab itu, peranannya menjadi begitu penting dan berarti tatkala berada di tengah masyarakat. Sangat begitu berartinya, sejarah perjalanan sebuah bangsa pada kebanyakan negara di dunia telah mencatat bahwa perubahan

sosial (*social change*) yang terjadi hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa.

Maka, sikap yang dimunculkan oleh gerakan mahasiswa dalam hal ini adalah tindak korupsi yaitu menolak adanya korupsi yang terjadi di Indonesia. Karena tindakan korupsi selalu memberikan dampak negatif bagi tiap individu, masyarakat dan negara. Disamping itu, gerakan mahasiswa memandang tindakan korupsi itu sebagai penghancur moral dan kehidupan yang dinamis disuatu negara.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi gerakan islam yang mempunyai keberpihakan terhadap isue publik secara massif dan terukur sebagaimana porsi mahasiswa yang lebih mengedepankan aspek dan idealitas. Disamping itu, hakekat dasar yang di bangun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah membangun *civil movement* yang mengedepankan sentimentasi peradaban yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dengan nilai-nilai moral keislaman.

Berdasarkan hal itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi gerakan islam yang merespon isue-isue publik sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan garis kebijakan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selain itu fungsi kontrol yang diwujudkan dengan merespon isue-isue publik dengan berbagai media ini juga digariskan didalam misi gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk dapat mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera tanpa adanya penindasan. Dalam merespon isue publik

ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukannya dengan berbagai media diantaranya dengan melakukan pembentukan opini di masyarakat melalui diskusi, dialog, seminar. Selain itu respon isue ini juga dilakukan dengan melakukan aksi massa sebagai salah satu bentuk respon terhadap isue publik seperti korupsi.

Hal ini dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai salah satu wujud kepedulian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terhadap kondisi negara saat ini. Selain sebagai sebuah wujud kepedulian terhadap bangsa ini, hal itu juga dilakukan untuk membebaskan kaum *mustad'afin* dari ketertindasan. Pada dasarnya hal ini dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai salah satu wujud nyata untuk memegang teguh dan menjalankan garis perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang tercantumkan didalam Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Peranan yang dipegang oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan pendidikan tentang anti korupsi kepada masyarakat. Pendidikan Anti Korupsi adalah upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai arti korupsi dan prinsipnya. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga membentuk *character building* atau watak manusia, agar mampu melawan tindak korupsi. Aspek penekanan dalam pendidikan anti korupsi bukan

sekadar pengayaan wacana, melainkan juga dari pendidikan itu diharapkan muncul keberanian diri seseorang untuk menjauhi tindak korupsi.

Dalam pendidikan anti korupsi, korupsi terbagi menjadi tiga bagian yaitu. Pertama, korupsi dalam tataran paling rendah yang disebut *betrayal of trust*, pengkhianatan terhadap kepercayaan. Misalnya mahasiswa mencotek. Kedua, *abuse of power*, penyalahgunaan wewenang. Ketiga, *material benefit*, keuntungan material. Itu yang paling besar yang saat ini sedang dilawan oleh banyak orang. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga menjadi kelompok kepentingan (*intres group*) yang menekan pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tentang korupsi.

## B. Perumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian masalah perlu dirumuskan terlebih dahulu agar penelitian dapat berlangsung pada sasaran obyek yang telah ditentukan. Tujuan utama dari penelitian adalah memecahkan suatu masalah. Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.<sup>4</sup>

Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukan ketika tidak puas melihatnya saja melainkan kita ingin melihat lebih dalam.

---

<sup>4</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hal 34.

Berdasarkan faktor tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: *Bagaimana Respon Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Yogyakarta Terhadap Isue Pemberantasan Korupsi di Indonesia di Era Reformasi Periode 2003-2006?*

### C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.<sup>5</sup> Berdasarkan pada batasan tersebut maka akan dijelaskan batasan-batasan tentang:

#### 1. Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan kepada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sofian Efendi dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ESD, Jakarta 1989, hal 37.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 105.

Dalam pengertian diatas, gerakan dalam hal ini gerakan sosial diartikan sebagai bentuk resistensi dari kelompok masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Sementara itu, sepanjang sejarah gerakan mengalami pergeseran paradigma. Saat ini banyak aktivis gerakan yang meyakini bahwa sebuah perubahan yang mendasar mutlak membutuhkan tiga syarat yaitu adanya ideologi alternative, kedua, adanya organisasi yang kuat yang akan menjadi penopang dukungan rakyat dan ketiga, adanya momentum yang tepat.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Tumer & Kilian (1957) merumuskan gerakan sosial (social movement) sebagai suatu kolektifitas yang berlangsung dalam waktu yang agak lama dan mempunyai tujuan mengadakan perubahan atau menentang terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat.

Disamping itu, gerakan sosial memiliki bentuk-bentuk antara lain demonstrasi (aksi massa), opini publik melalui seminar, diskusi, talk show, tulisan-tulisan di media, penyadaran kepada publik dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari gerakan sosial yaitu untuk melakukan kontrol terhadap ketimpangan sosial yang sengaja maupun tidak, terjadi dan berkembang pesat akibat negara yang abai terhadap masa depan rakyatnya

---

<sup>7</sup> Timur Mahardika, gerakan massa; *mengupayakan demokrasi dan keadilan secara damai*, Yk; Lapera Pustaka Utama. 2000 hal 31.

Masalah utama dari pergerakan sosial adalah perjuangan antara pergerakan dan pemegang kekuasaan untuk mengambil (simpati), pemikiran (pendapat umum), dan dukungan yang aktif dari mayoritas massa yang besar, yang akhirnya memegang kekuasaan untuk mempertahankan pemegang status quo maupun menciptakan perubahan.

Dalam upaya memahami dan menjelaskan suatu fenomena, para ahli ilmu sosial telah mengembangkan khasanah pengetahuan dan wacana yang sangat kaya dan terus berkembang hingga kini. Pada dataran teoritis, hal ini telah melahirkan berbagai teori tentang gerakan sosial. Adapun macam-macam teori gerakan sosial beberapa diantaranya yaitu teori tindakan kolektif (*collective action/behavior*), teori nilai tambah (*value added*), teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*), teori proses politik (*political process*), dan teori gerakan sosial baru (*new social movement*)

Mengutip pendapat Rajendra Singh, Prasetyo menyatakan beberapa karakteristik umum dalam Gerakan Sosial Baru<sup>8</sup>

1. Gerakan Sosial Baru menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya mengalami penciutan dan aspek masyarakat sipil

---

<sup>8</sup> Suharko, Ph.D, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang, Averroes Press, 2006 hal 65.

tengah digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Karenanya Gerakan Sosial Baru membangkitkan isue pertahanan diri komunitas dan masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatur negara, agen-agen pengawasan dan kontrol sosial. Dalam konteks ini maka medan perjuangannya bisa bergerak melintasi wilayah kerja tradisional dari industri dan pabrik, pertanian, dan peternakan. Gerakan Sosial Baru menyerukan sebuah kondisi yang adil dan bermartabat bagi konsepsi kelahiran, kedewasaan, dan reproduksi makhluk manusia yang kreatif dan berseiring dengan alam.

2. Secara radikal Gerakan Sosial Baru mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas. Pemikiran akademis kiri menyajikan gugatan pada sistem paparan Marxis materialis tentang gerakan dan perubahan dalam masyarakat. Sebuah gugatan atas disingkirkannya isue-isue gender, ekologi, ras, kesukusn dan lain sebagainya.
3. Mengingat latar belakang kelas tidak menentukan identitas aktor ataupun penopang aksi kolektif. Gerakan Sosial Baru pada umumnya melibatkan politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput kerap memprakarsai gerakan mikro kelompok-kelompok kecil, membidik isue-isue lokal dengan sebuah

dasar institusi yang dibatasi. Mereka melahirkan asosiasi demokratis terorganisasi yang terjalin dalam federasi longgar pada tingkat nasional. Dengan demikian Gerakan Sosial Baru secara umum merespon isue-isue yang bersumber dari masyarakat sipil, mereka membidik domain sosial masyarakat sipil dari pada perekonomian atau negara, membangkitkan isue-isue sehubungan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif.

4. Berbeda dengan gerakan sosial klasik, struktur Gerakan Sosial Baru didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak, orientasi, dan oleh heterogenitas basis sosial.

Adapun akibat yang ditimbulkan oleh Toeri Gerakan Sosial yaitu untuk memperoleh dan memelihara demokrasi serta membuat masyarakat lebih kritis terhadap permasalahan sosial. Mereka mengizinkan warganegaranya untuk menentang pusat kekuasaan dan menjadi aktif dalam proses pengambilan keputusan masyarakat, khususnya pada waktu yang normal untuk mengikut sertakan perilaku politik mereka yang tidak efektif sama sekali.

Pergerakan sosial mengarahkan warganegaranya dan pendapat umum untuk menghadapi tantangan pemegang kekuasaan dan dan keseluruhan masyarakat bertahan pada kesetiaan dan nilai-nilai

universal yang mengganti semua kerugian pada permasalahan sosial. Yang terbaik bagi mereka adalah, mereka menciptakan suatu keseluruhan kekuasaan pada masyarakat, perpindahan kekuatan sosial dan politis dari golongan atas dan institusi keorang-orang golongan bawah. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu terjadinya suatu perubahan pada sistem pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu pro pada rakyat kecil.

## 2. Korupsi

Definisi korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere*: busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur:

- melanggar hukum yang berlaku
- penyalahgunaan wewenang
- merugikan negara
- memperkaya pribadi/diri sendiri

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua

bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

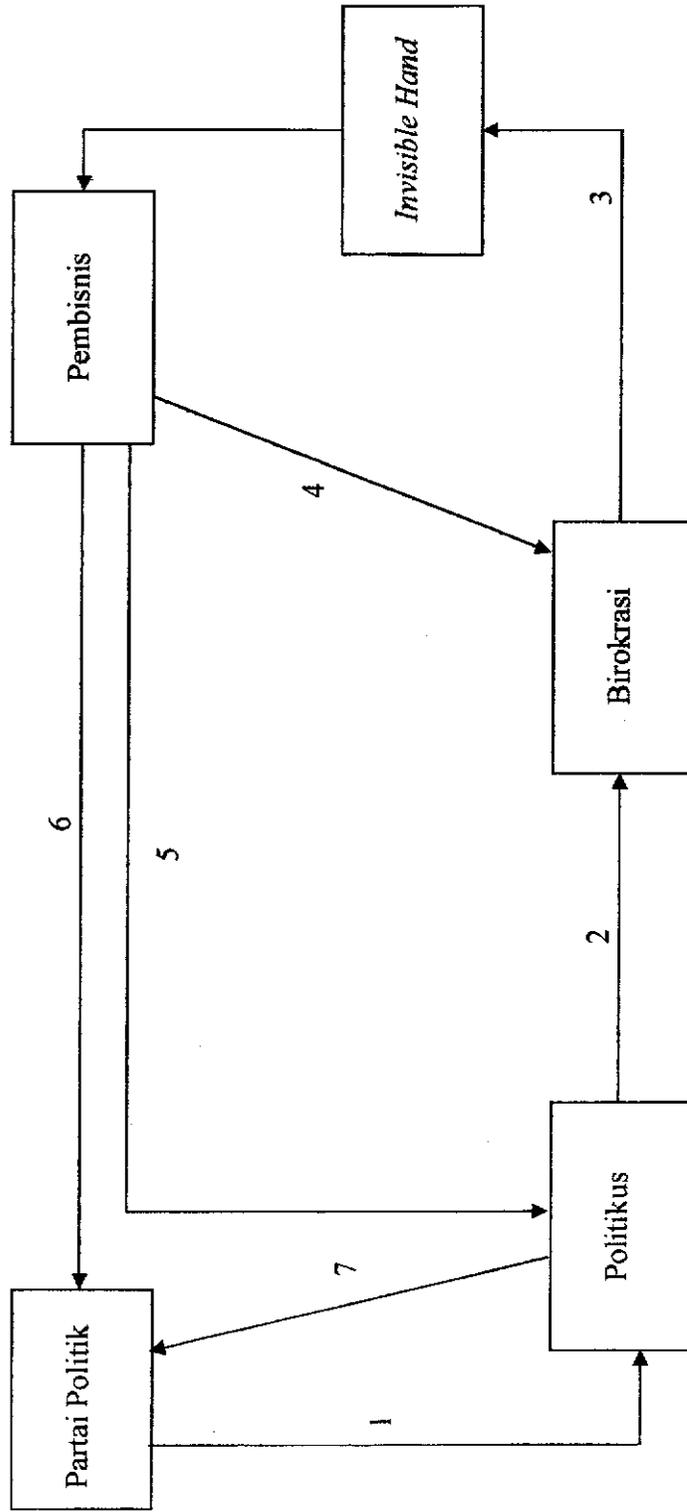
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat melembaga, hal ini dapat kita lihat pada tindak pidana korupsi yang semakin marak dan tingkat persentase penangkapannya sangat minim. Itu ditandai dengan adanya intrik-intrik atau hubungan tindak pidana korupsi

yang dilakukan oleh lembaga atau badan pemerintah dengan institusi-institusi swasta seperti para pengusaha. Selanjutnya pola hubungan atau siklus korupsi dapat dilihat pada Bagan 1.1.

Bagan 1.1  
Sirkulasi Korupsi Politik



Sumber: Teten Masduki, *Indonesia Corruption Watch*, dalam modulnya *Instansi dan Manajemen Pemberantasan korupsi*.

1. Kandidat partai politik
2. Politik Birokrasi
3. Kontrak, Anggaran Belanja, Memberi Perizinan, Fasilitas Perbankan
4. Pemberian Suap, *Kick Back*
5. Kampanye dengan memberikan suap
6. Politik Dengan Memberikan Suap, pembelian kandidat dari partai politik
7. Partai politik yang dominan

Adapun siklus dari korupsi politik yaitu:

1. Partai politik memberikan kebebasan kepada siapa saja yang mau mencalonkan diri mereka sebagai kandidat dari partai yang bersangkutan dengan syarat kandidat partai politik harus mau mematuhi peraturan partai dan mau membayar iuran yang diminta oleh partai seperti uang sumbangan buat partai dan uang sumbangan untuk melakukan kampanye politik. Setelah calon kandidat dari partai politik atau politikus menyetujui persyaratan yang diajukan oleh partai politik, maka calon kandidat tersebut akan masuk seleksi sebagai kandidat resmi atau yang akan mendapat bargaining posisi calon jadi dengan cara melihat seberapa banyak calon kandidat atau politikus memberikan kontribusi sumbangan kepada partai.
2. Setelah para kandidat itu jadi, maka mereka akan menguasai birokrasi-birokrasi di pemerintahan. Di tubuh birokrasi inilah mereka membuat kebijakan yang menguntungkan diri pribadi, keluarga, kelompok dan partai mereka karena birokrasi dilihat sebagai tempat yang paling nyaman untuk mengembalikan modal mereka yang digunakan pada saat kampanye (politik birokrasi).
3. Politik yang dibangun pada tubuh birokrasi dengan para pengusaha sangat tidak sehat karena melalui *invisible hand*, para pengusaha memberikan kontrak dan memberikan fasilitas kepada kandidat

yaitu anggaran belanja dan fasilitas perbankan. Sedangkan para kandidat memberikan perizinan pada para pengusaha agar mendapatkan rasa aman dan usaha yang digeluti para pembisnis bisa lancar dan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin.

4. Para pembisnis memberikan tanda jasa atau ucapan terima kasih kepada birokrat yang telah memberikan mereka jalan keluar dengan cara membuat suatu kebijakan yang menguntungkan mereka agar tetap eksis dalam dunia usaha (*kick bac*).
5. Para pembisnis memberikan modal kepada politikus untuk mencalonkan diri dan memberikan dana untuk kampanye dengan memberikan suap supaya kepentingan bisnis mereka tetap langgeng.
6. Pembisnis memberikan dana kepada partai politik atau politik dengan memberikan suap dengan tujuan untuk meloloskan calon yang mereka usulkan dengan persyaratan yang diajukan oleh para pembisnis atau dalam kata lain pembelian kandidat dari partai politik.
7. Politikus atau kandidat partai politik mulai melakukan menerapkan suatu kebijakan yang menguntungkan partai politik sebagai politik terima kasih seorang kandidat kepada partai politik yang

memberikan mereka kesempatan untuk duduk dan menjabat sebagai pjabat.

Adapun yang mempengaruhi korupsi tetap eksist dan langgeng yaitu karena adanya hubungan yang sangat erat antara pemegang kekuasaan dengan para pengaruh kelompok kepentingan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1.  
Hubungan Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Kekuasaan

		Kekuatan Elit Politik	
		RENDAH	TINGGI
Partisipasi Masyarakat	RENDAH	<i>Fragmented Patronage 1</i>	<i>Corrupt Dictator 2</i>
	TINGGI	<i>Interest Goup Contolled 3</i>	<i>Patronage Collaboration 4</i>

Sumber: Teten Masduki, *Inmdonesia Corruption Watch*, dalam modulnya Instansi dan Manajemen Pemberantasan korupsi.

Berdasarkan tabel diatas, maka sangat jelas pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh adanya hubungan yang dibangun oleh kelompok kepentingan dengan pemegang kekuasaan atau pemerintah.

Hubungan yang ditimbulkan antara pemerintah dengan para pengaruh kelompok kepentingan adalah:

1. *Fragmented Patronage*

Kekuasaan dan pengaruh elit politik maupun kelompok kepentingan masih terbatas pada kekuatan yang sama. Kondisi ini biasanya terjadi pada masa transisi

2. *Corrupt Dictator*

Elit politik telah mengkonsolidasikan kekuasaan sehingga memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan mempunyai kontrol yang kuat atas sumber daya dan masyarakat. Korupsi yang terjadi menjadi sistematis serta merajalela disemua sektor.

3. *Interest Group*

Kelompok kepentingan memiliki posisi tawar yang kuat dan menggunakan sumber daya yang dimiliki itu untuk mempengaruhi kebijakan publik. Pada model ini, elit politik lemah dan bergantung kepada kelompok kepentingan guna membiayai aktivitas politiknya.

4. *Patronage Collaboration*

Batas antara negara dan sektor privat tidak jelas. Kolaborasi antara elit politik dengan kelompok kepentingan tidak hanya melahirkan korupsi yang sistemik tapi juga legal.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi ada dua jenis korupsi yaitu:

1. Korupsi karena kebutuhan (*need corruption*)

Yang menyebabkan korupsi ini terutama karena adanya sistem yang kurang baik, misalnya sistem pegawai negeri sipil (PNS), terutama sistem penggajian pegawai negeri sipil yang sangat rendah. Korupsi ini diberantas dengan tindakan perbaikan sistem pegawai negeri sipil itu sendiri. Ini termasuk upaya pencegahan korupsi yang merupakan tugas KPK.

2. Korupsi karena kerakusan (*greedy corruption*)

Sementara, korupsi golongan kedua lebih banyak disebabkan karena ketamakan dan mental yang rusak. Ini harus diperbaiki dengan upaya penindakan, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Di Indonesia banyak korupsi yang terpaksa dilakukan karena kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun korupsi karena ketamakan cukup banyak juga. Biasanya korupsi jenis pertama ini jumlahnya tidak besar dibandingkan korupsi jenis kedua.

Sedangkan menurut Amien rais<sup>9</sup> korupsi terbagi menjadi empat tipologi yaitu:

1. Korupsi Ekstortif

Korupsi ini merujuk pada situasi dimana seorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak kebutuhannya.

2. Korupsi Manipulatif

Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.

3. Korupsi Nepotistik

Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap *eselon*.

4. Korupsi Subyektif

Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan.

---

<sup>9</sup> Ma'mun Murod Al-Barbasy dalam seminar nasional AIPI XX, *Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. 2006. hal. 3

Sementara Syad Hussain Alatas<sup>10</sup> membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam tujuh tipologi yaitu:

1. *Transastive Corruption*

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh keduanya.

2. *Exortive Corruption*

Jeni korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya.

3. *Investive Corruption*

Pemberian barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. *Nepotistic Corruption*

Penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam

---

<sup>10</sup> Ibid.

bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. *Defensive Corruption*

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6. *Antogenic Corruption*

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

7. *Supportive Corruption*

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

Upaya atau strategi yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi dengan cara:

1. Strategi Jangka Pendek

Strategi ini diharapkan mampu segera memberikan manfaat atau pengaruh dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dicapai melalui:

- a. Kegiatan penindakan yang keras dan tegas.
- b. Membangun sistem kepegawaian yang berkualitas, mulai dari perekrutan, sistem pengkajian, sistem penilaian kinerja dan sistem pengembangannya.

- c. Membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai alat mekanisme pengendalian (*control mechanism*) terhadap lembaga pemerintahan agar terwujud suatu perubahan yang berlandaskan efektifitas, efisiensi dan profesionalisme.

## 2. Strategi Jangka Menengah

Strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

- a. Membangun beberapa proses kunci dalam perbaikan manajemen yang berorientasi kepada hasil dan infrastruktur informasi terkait lainnya di instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas.
- b. Memberikan motivasi untuk terbangunnya suatu kepemimpinan yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan

pemerintah serta meningkatkan akses publik terhadap pemerintahan.

### 3. Strategi Jangka Panjang

Strategi ini diharapkan mampu merubah budaya atau pola pandangan dan persepsi masyarakat. strategi ini bisa dilakukan dengan cara:

- a. Membangun dan mendidik masyarakat pada berbagai tingkat dan jenjang kehidupan untuk mampu menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya.
- b. Membangun suatu tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
- c. Membangun nilai etika dan budaya anti korupsi.

### 3. Respon

Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi. Hubungan dengan derinteraksi bersifat dua arah atau lebih. Respon atau reaksi yang timbul dalam interaksi tidak hanya ditentukan oleh aksi itu, tetapi juga oleh aksi lain. Respon juga ikut menentukan suatu aksi (tepatnya: besarnya aksi juga dipengaruhi oleh besarnya reaksi).<sup>11</sup>

Selanjutnya, interaksi sosial akan membangun kesamaan persepsi

---

<sup>11</sup> Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia. Jakarta. 1992. hal 11.

auntar anggota masyarakat, yang kemudian menentukan interpretasi seseorang terhadap suatu fenomena sosial.

Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai dengan perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan politik. Didalam melihat respon, teori persepsi mengasumsikan bahwa perilaku suatu individu ditentukan oleh hubungan antara hal-hal yang diyakininya dengan hal-hal yang diharapkan.<sup>12</sup> Disamping itu, respon seseorang dipengaruhi oleh cara ia melihat, menafsirkan dan menilai lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.

Selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya, apakah situasi baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan, dan lain-lain. Persepsi juga mengandung keyakinan tentang sesuatu yang dianggap benar meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

#### **D. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau

---

<sup>12</sup> Riswandha Imawan. *Analisis Hasil Pemilu 1992*, Makalah Seminar Nasional UGM. 1994 (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, 1997)

batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batas pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah:

1. Respon

Respon yaitu suatu perubahan tindakan dan perubahan kondisi, sikap, nilai, keyakinan dan persepsi tiap individu yang disebabkan oleh stimulus atau ransangan (keadaan) yang diberikan kepadanya.

2. Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa adalah generasi muda yang sedang mengenyam pendidikan tingginya di sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai kelompok orang yang melihat dan merespon lingkungan dengan penuh kearifan, kritis, analisis, penuh tanggung jawab dengan wawasan keilmuan yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Idealisme juga menjadi ciri yang melakat pada mahasiswa.

Ciri-ciri tersebut yang mendasari munculnya gerakan mahasiswa dimanapun adanya. Aktivis mahasiswa yang melakukan gerakannya sebagai wujud dari kepedulian dan keritisan mereka pada kondisi masyarakat yang sedang berlansung. Gerakan mahasiswa dilakukan untuk mengubah kondisi-kondisi tersebut berdasarkan pandangan yang melandasi gerakannya. Tidak semua mahasiswa adalah aktivis, dalam artian mau ikut melibatkan diri merubah suatu kondisi yang ada dalam masyarakat.

Gerakan mahasiswa dapat dipahami sebagai suatu aksi massa yang terkoordinir untuk melakukan suatu perubahan kondisi yang ada berdasarkan pandangan sosial tertentu yang diyakini sebagai dasar dari gerakan. Gerakan mahasiswa dilakukan dengan tanpa adanya *vasted interest* atau kepentingan politik praktis dibaliknya.<sup>13</sup> Gerakan ini hanya merupakan respon kepedulian pada kondisi masyarakat.

Dari perkembangannya yang terjadi hingga saat ini, gerakan mahasiswa tidak bisa dipahami hanya sebatas gerakan massa (dalam aksi protes dan demonstrasi), namun gerakan mahasiswa itu sendiri sudah berkembang menjadi suatu gerakan yang mencoba ikut membangun kesadaran dan melakukan advokasi masyarakat.

### 3. Korupsi

Korupsi pada hakekatnya merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dan penyimpangan penggunaan wewenang atau jabatan mengenai tugas dan kewajiban dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara atau masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang menggunkan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang

---

<sup>13</sup> B. Wicaksono Triantoro, *Dinamika Gerakan Mahasiswa di Indonesia: Suatu Tinjauan Mengenai Gerakan Mahasiswa Kontemporer Pasca 1978 Dalam Kerangka Depolitisasi Kampus* (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, 1997)

dimiliki seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap.

#### 4. Era Reformasi

Era reformasi adalah keadaan atau zaman dimana saat itu sedang mengupayakan penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik atau bisa dikatakan bahwa reformasi memiliki makna terjadinya perubahan-perubahan yang menyeluruh terhadap struktur politik, berikut peran-peran dan pemegang peran didalam struktur itu. Reformasi menuntut terjadinya penyingkiran struktur politik otoriter dan digantikan oleh struktur politik yang demokratis. Perubahan-perubahan tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang demokratis, konstitusional dan damai.

#### **E. Definisi Operasional**

Pengertian definisi operasional menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi 1985 : 46 adalah sebagai berikut:

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Adapun cara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam merespon isue korupsi yang muncul yaitu dengan cara:

1. Aksi Massa
2. Opini publik melalui seminar
3. Diskusi
4. Talk show
5. Tulisan-tulisan di Media
6. Penyadaran Kepada Publik
7. Mendesak Institusi Peradilan

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>14</sup>

Winarno Surachman berpendapat metodologi adalah pengetahuan tentang bagaimana cara kerja yaitu dengan kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

---

<sup>14</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hal 34.

## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>15</sup> Peneliti deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- b. Data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan.

## 2. Unit Analisis

Yang akan dijadikan sebagai nara sumber oleh peneliti dalam pencarian data yaitu:

- a. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  
Cabang Yogyakarta

---

<sup>15</sup> Moh Nazir, dalam *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, hal 63

b. Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang  
Yogyakarta

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta yaitu dengan mengambil studi kasus di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu karena penulis tertarik untuk mengetahui respon Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terhadap issue korupsi di Indonesia pada era reformasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan obyek penelitian akan menggunakan tehnik-tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat tehnik ini adalah menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan. Interview atau wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu dengan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Yogyakarta dan saya akan mencoba mewawancarai sekitar 7 orang yaitu masing-masing kepala bidang.

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi dengan materi yang diambil.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam pencarian data, penelitian ini untuk mengetahui adanya rangsangan tertentu yang diinginkan dengan cara mengamati langsung.

5. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer: data langsung dari respon untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan respon Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terhadap issue korupsi.

b. Data sekunder: data yang telah diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai respon Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terhadap issue korupsi.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, dalam hal ini maka proses analisa data yang diteliti penyusun menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikan

data lalu menganalisa sesuai dengan gejala dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan angka. Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa data adalah: proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi. Analisa data juga bisa diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian.

Dalam teknik ini peneliti mencoba melakukan dengan membuat pengklasifikasian data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang digunakan seperti terdiri dari catatan lapangan, catatan peneliti, dokumentasi berupa laporan, studi pustaka, artikel, wawancara dan sebagainya. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu menyajikan data kemudian menarik kesimpulan, selain itu pula dilakukan siklus antar tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis.

Adapun proses yang dilakukan dalam analisa data ini adalah:

1. Reduksi Data

Tahap ini meliputi proses manipulasi, integrasi, transformasi data dan menyoroti data ketika data itu disajikan. Tahap ini dilakukan dengan cara antara lain peningkatan, pengkodean,

dan pengkategorisasian data. Reduksi data membantu mengidentifikasi aspek-aspek penting dari pertanyaan penelitian untuk memfokuskan pengumpulan data, pengambilan sampel, metode-metode sehingga akhirnya pada suatu kesimpulan.

## 2. Pengorganisasian Data

Merupakan proses penyusunan semua informasi seputar tema-tema tertentu, pengkategorian informasi dalam cakupan yang lebih spesifik dan menyajikan hasilnya dalam beberapa bentuk.

## 3. Interpretasi Data

Proses ini mencakup pembuatan keputusan-keputusan dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian pola-pola dan kejegan, juga menemukan kecenderungan-kecenderungan. Memberikan penjelasan terhadap aspek-aspek tertentu yang memungkinkan pengembangan beberapa sudut pandang yang lebih tegas untuk menuntun penelitian selanjutnya.